

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain (Ulum & Juanda, 2018). Penelitian yang digunakan menggunakan data kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama wilayah Kota Malang yaitu KPP Pratama Malang Utara yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Klojen, kec. Klojen, Kota Malang dan KPP Pratama Malang Selatan berlokasi di jalan Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Malang karena jumlah PKP di kota Malang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten Malang dan wilayahnya yang lebih besar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah data semua wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diambil dari bagian PDI (Pengolah Data dan Informasi) di lingkup KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan.

2. Sampel

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai

dalam penelitian ini yang diambil dari bagian PDI adalah terkait wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang ber NPWP dan terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan, bukti SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP di KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan mulai Januari 2016 – Desember 2018. Jumlah sampel yang diambil merupakan bagian dari semua populasi dan data yang digunakan berupa *studi time series* selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini sejumlah 36 buah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, target penerimaan PPN, jumlah PKP yang terdaftar, jumlah SSP PPN yang disetorkan, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan jumlah pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP dengan batas waktu pelaporan yaitu tanggal terakhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (tanpa ada pembetulan SPT). Sumber data diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan yang diambil per bulan dalam 3 periode, bulan Januari 2016 sampai Desember 2018 dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Perolehan Data

1. Dokumentasi

Teknik perolehan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu data yang sudah jadi atau diolah oleh orang lain dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan pencatatan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian.

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pertumbuhan penerimaan PPN. Laju pertumbuhan ekonomi menurut Widodo dalam Oktarina (2010) merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka waktu panjang. Jika diterapkan dalam Pajak Pertambahan Nilai, laju pertumbuhan adalah proses kenaikan PPN dalam jangka panjang.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia : (1) Pajak bersifat objektif yang dikenakan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, (2) Pajak atas konsumsi Dalam Negeri yang dikenakan atas setiap tingkat penyerahan BKP/JKP, (3) Pajak tidak langsung dimana pajak dapat dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain, (4) Tidak menimbulkan efek pajak berganda, dan (5) Penghitungan dikenakan bertahap dengan metode Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Dalam perspektif pemerintah, penerimaan PPN diharapkan meningkat untuk keberlangsungan hidup negara kedepannya, seperti kebutuhan pembangunan, pendidikan dan medis, mendorong ekspor, pemerataan pembebanan pajak, serta sebagai sumber penerimaan negara.

Bagi Pengusaha menjadikan keuntungan apabila dikukuhkan sebagai PKP, diantaranya: Pengusaha dinilai memiliki sistem yang lebih baik, serta legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak,

Pengusaha dianggap memiliki perusahaan yang besar, dan tentu akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, serta dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah, dan Pola produksi dan investasi menjadi lebih baik (klikpajak.id). Jika terjadi pada pengusaha yang tidak mengukuhkan dirinya sebagai PKP sesuai tata cara peraturan perpajakan maka sanksi yang diberikan jauh lebih berat dan dikenakan pajak yang lebih besar.

Bagi masyarakat dengan tingkat konsumtif yang tinggi dapat mampu mendorong pertumbuhan pajak khususnya dalam penerimaan PPN meskipun secara tidak langsung pajak disetor oleh pihak lain (PKP) yang bukan penanggung pajak.

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diukur dari jumlah realisasi penerimaan PPN per bulan, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Sariroh, Andi dan Nofianti, 2017), dimana Pertumbuhan PPN dihitung mulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018:

$$\text{Pertumbuhan PPN} = \frac{\text{jumlah PPN bulan ini} - \text{jumlah PPN bulan lalu}}{\text{jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

a. Pertumbuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN, tidak termasuk

pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam penelitian ini PKP yang merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* diambil berdasarkan jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan mulai bulan Januari 2016 hingga Desember 2018.

$$\text{Pertumbuhan PKP} = \frac{\text{jumlah PKP bulan ini} - \text{jumlah PKP bulan lalu}}{\text{jumlah PKP bulan lalu}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN

SSP PPN merupakan surat yang digunakan PKP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Batas waktu pembayaran PPN yaitu tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Mardiasmo (2016:37) Terdapat 2 fungsi Surat Setoran Pajak: (1) Sebagai sarana untuk membayar pajak, (2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. SSP PPN dihitung menggunakan indeks pendeflesian deret waktu (Sariroh, Andi dan Nofianti, 2017) tiap bulan mulai bulan Januari 2016 sampai Desember 2018.

$$\text{Pertumbuhan SSP PPN} = \frac{\text{jumlah SSP PPN bulan ini} - \text{jumlah SSP PPN bulan lalu}}{\text{jumlah SSP PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

c. *Tax compliance*

Kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN diukur menggunakan rasio kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang target rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan batas pelaporan diakhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT dihitung dari perbandingan antara jumlah seluruh SPT Masa PPN yang diterima dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Rumus perhitungannya dari jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulan dibagi dengan jumlah PKP terdaftar, dihitung mulai bulan Januari 2016 sampai Desember 2018.

$$Tax\ compliance = \frac{\text{pelaporan SPT Masa PPN tiap bulan}}{\text{jumlah PKP}} \times 100\%$$

Batas lapor PPN yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan jenis pajak lain. Upaya ini memberikan PKP kelonggaran dalam pelaporan PPN karena mempertimbangkan proses bisnis yang harus dilalui. Kelonggaran tersebut juga berkaitan dengan proses tutup buku perusahaan yang umum dilaksanakan setiap awal bulan. Sehingga sebelum tutup buku, perusahaan masih bebas mengubah faktur pajak jika terjadi kesalahan. Jika melewati batas lapor PPN yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda senilai Rp 500.000.

G. Teknik/Tahapan Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Selanjutnya, sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan analisis terlebih dahulu menggunakan pengujian asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi). Pengujian hipotesis dianalisis menggunakan alat statistik linear berganda meliputi Koefisien Determinasi, Uji Statistik F, dan Uji Statistik T.

Tahapan Analisis data :

1. Statistik deskriptif

Dilakukan dengan tujuan melihat karakteristik umum dari data penelitian dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Setoran Pajak (SSP), *Tax compliance*, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan bantuan *software SPSS 20* yang dipakai.

2. Uji Asumsi Klasik

Dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat dan membuktikan apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik diantaranya :

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) mengemukakan bahwa: “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal”.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:105) mengemukakan bahwa: “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol”.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) mengemukakan bahwa: “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterodastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterodastisitas”.

d. Uji Autokorelasi

Sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi.

3. Rancangan Analisis dan Uji hipotesis

Rancangan uji hipotesis untuk mengetahui korelasi dari dua variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah analisis regresi linier berganda. Adapun langkah-langkah untuk menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis (H_a) adalah sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:116) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan PPN

b3 = Koefisien Regresi ketiga

a = Harga Konstanta

X1 = Pertumbuhan PKP

b1 = Koefisien Regresi pertama

X2 = Pertumbuhan SSP PPN

b2 = Koefisien Regresi kedua

X3 = *Tax compliance*

b. Uji Hipotesis

a) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghazali, 2011:97). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam suatu analisis regresi. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai *adjusted R-Square* yang mendeteksi satu berarti kemampuan variabel-variabel independen. *Adjusted R-Square* yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas. Apabila terdapat nilai *Adjusted R-Square* bernilai negatif maka dianggap nilai 0 (Imam Ghazali, 2011:97).

b) Uji Simultan (Uji F)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Imam Ghazali (2011:101) Uji F dapat dilakukan dengan cara melihat *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria: (1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima; (2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

c) Uji Parsial (Uji T)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t : (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

